

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tren laporan keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang di seluruh dunia. Hingga tahun 2019 tercatat terdapat 12.075 Perusahaan di seluruh dunia mengungkapkan laporan keberlanjutannya. Jumlah ini menggambarkan semakin meningkatnya komitmen perusahaan global terhadap isu keberlanjutan. Komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan diilustrasikan oleh informasi dalam Laporan Keberlanjutannya. Laporan keberlanjutan berisi berbagai informasi tentang kegiatan perusahaan berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial masa lalu, saat ini dan masa depan, serta konsekuensi keuangan masa lalu, saat ini dan masa depan dari keputusan perusahaan (Melinda & Wardhani, 2020).

Untuk menilai upaya keberlanjutan perusahaan, investor dan pemangku kepentingan sering menggunakan ukuran kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial berdasarkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Thomson Reuters mengembangkan Indeks dan Kontroversi Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Index tersebut mengukur kinerja suatu perusahaan terkait lingkungan, sosial dan tata kelola berdasarkan informasi yang disajikan dari laporan keberlanjutan perusahaan. Index ini terdiri dari tiga pilar penilaian diantaranya adalah *Environmental, Social, Governance* (Thomson Reuters, 2017).

Penilaian kinerja berdasarkan skor ESG (lingkungan, sosial dan tata kelola) saat ini menjadi langkah penting dalam menentukan kinerja bisnis yang sebenarnya. Investor menganggap bahwa dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan di setiap negara bukan tidak mungkin akan menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan. Salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selain pencemaran lingkungan, operasional perusahaan yang merugikan lingkungan bukan tidak mungkin akan berdampak pula terhadap konflik sosial. Oleh karena itu perusahaan harus lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan tersebut (Syafurullah & Muharam, 2017).

Pemerintah pun memiliki anggapan yang sama bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Diterbitkannya Undang-Undang

Indah Nur Chazanah, 2023

**ANALISIS INDEX PENGUNGKAPAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DAN KEPATUHAN SYARIAH: STUDI KOMPARASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) TAHUN 2019-2021**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” yang selanjutnya disebut dengan (UU PT) telah diatur terkait CSR pada pasal 74 merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan turut serta dalam berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta salah satu upaya pemerintah dalam menggaungkan program pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini menegaskan bahwa perseroan wajib menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. Jika kewajiban tersebut diabaikan oleh perusahaan maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Adhari, 2015).

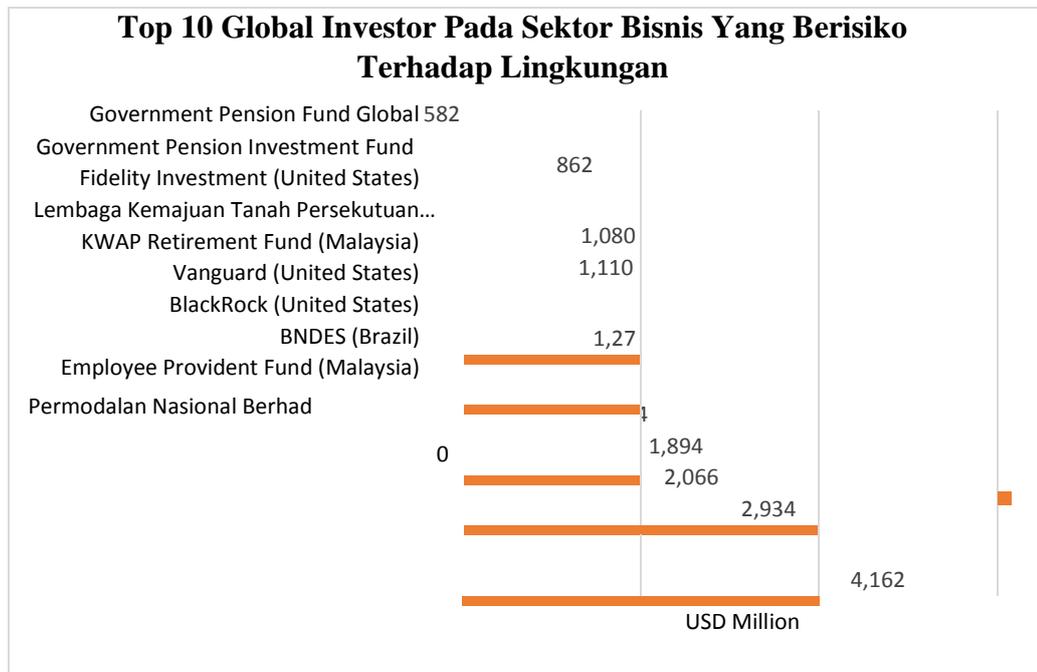
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga otoritas di Negara Indonesia, turut serta berperan dalam upaya keberlanjutan melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*). *Sustainable financing* merupakan keuangan berkelanjutan dimana keputusan investasi dibuat dengan mempertimbangkan tidak hanya manfaat ekonomi tetapi juga faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (OJK, 2021). Namun saat ini masih terdapat banyak bank syariah yang belum optimal dalam program keberlanjutan. Hal tersebut ditandai dengan kurang transparansinya bank syariah dalam pengungkapan kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Menurut (PRI, 2019) keterlibatan lembaga keuangan Islam di dunia tentang masalah lingkungan dan sosial masih berada dalam level yang rendah.

Tidak optimalnya transparansi dan tatakelola ini dapat dilihat dalam beberapa isu strategis seperti: produk yang kurang variatif, pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan adanya perbedaan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan istilah, akad dan produk (Abubakar & Handayani, 2017). Banyaknya anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara bank syariah dengan konvensional hal tersebut terjadi karena kurangnya transparansi pengungkapan terkait tatakelola oleh perusahaan, sehingga timbul pandangan yang keliru dari masyarakat.

Lembaga keuangan sebagai salah satu sektor yang paling krusial dalam perekonomian seharusnya berhati-hati dalam menyalurkan dananya pada sektor bisnis. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan seharusnya lembaga keuangan memiliki kebijakan tersendiri dalam segi penyaluran dana (Abubakar & Handayani, 2017). Berinvestasi pada bisnis yang berisiko terhadap lingkungan tentunya akan berdampak pada hilangnya kepercayaan para *stakeholder*. Bank sebagai lembaga keuangan harus bisa menjaga kepercayaan para *stakeholder* termasuk investor agar mereka mau menginvestasikan dananya pada bank tersebut. Saat ini investor tidak hanya menilai perusahaan dari segi kinerja keuangannya saja namun juga dinilai dari kinerja lingkungan, sosial dan tatakelola sebuah perusahaan. Tren ini mulai muncul dari kesadaran para investor tentang keberlanjutan sebuah perusahaan (Qoyum dkk., 2022).

Pengungkapan *environmental* dan *social* merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Pengungkapan ini mencerminkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan secara aktual dan riil. Perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dengan cara melakukan pengungkapan kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan dan sosial. Hubungan yang baik ini terbentuk karena tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan menandakan bahwa perusahaan mempunyai komitmen yang baik untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Perusahaan dapat menekan berbagai risiko yang muncul sehingga hal tersebut akan mengurangi biaya operasional dan biaya input yang lebih kecil (Syafurullah & Muharam, 2017).

Pada tahun 2021 terdapat lima puluh lembaga keuangan dan bank terbesar di dunia tercatat meningkatkan investasi dalam praktik perusahaan yang menyebabkan deforestasi dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selama pandemi covid mereka meningkatkan investasinya lebih dari 21% yakni sebesar \$8 miliar hingga April 2021. Lembaga keuangan tersebut berasal dari negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, Brazil, Korea Selatan, Amerika Serikat dan negara lainnya (Earth.org, 2021). Pada gambar 1.1 merupakan gambaran lembaga keuangan yang melakukan investasi pada bisnis yang berisiko pada lingkungan.



**Gambar 1.1 Top 10 Global Investor pada Sektor Bisnis yang Berisiko Terhadap Lingkungan**

*Sumber: (Earth.org, 2021)*

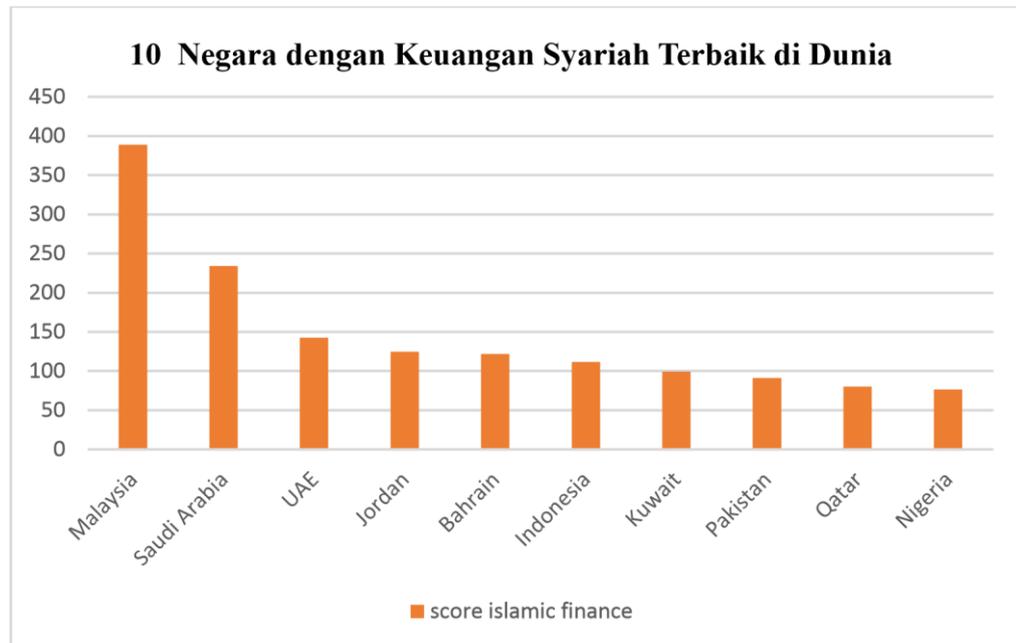
Berdasarkan gambar 1.1 terdapat 10 lembaga keuangan dari beberapa negara yang menjadi investor dengan nilai investasi tertinggi pada sektor bisnis yang berisiko terhadap lingkungan. Posisi tertinggi dimiliki oleh Permodalan Nasional Berhad (Malaysia) dengan nilai investasi sebesar \$5,710 Milion. (Earth.org, 2021) menyimpulkan bahwa kebijakan terkait ESG pada 50 investor lembaga keuangan tersebut sangat lemah yaitu rata-rata hanya 24% dalam peringkat.

*Environmental, Social, and Governance* (ESG) dapat menjadi salah satu kunci bagi perusahaan untuk mengintegrasikan bisnis berkelanjutan yang dapat menjadi faktor pendorong yang penting bagi kemajuan perusahaan. Pengembangan bisnis yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi saja, namun harus memperhatikan kinerja lingkungan dan sosial. Industri perbankan memiliki peran penting bagi pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Bank syariah dapat mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan yaitu dengan cara mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) ke dalam strategi bisnis perusahaan (Prakash, 2018). Bank syariah dianggap perlu untuk melakukan pengungkapan kinerja ESG karena pengungkapan tersebut akan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan keselarasan antara ESG dengan lembaga keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, saat ini regulator semakin mewajibkan bank umum dan bank umum syariah untuk mempertimbangkan dan melaporkan dampak lingkungan, sosial dan tatakelola dari kegiatan yang dilakukan. Investor syariah pun saat ini semakin fokus pada kepatuhan syariah dan dampak ESG dari investasi yang mereka lakukan. Kedua, sebagai bank syariah terdapat pilar penting untuk menjaga keberlangsungan bank syariah yaitu penyaringan negatif produk syariah untuk menghindari industri tertentu yang dianggap melanggar hukum atau tidak etis, seperti industri alkohol, tembakau, senjata, dan praktik-praktik yang berpotensi mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Para cendekiawan muslim pun semakin mendorong adanya penyaringan positif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek syariah saja namun juga aspek tanggung jawab secara sosial dan lingkungan (The Jakarta Post, 2021).

Selain pengungkapan ESG, pengungkapan kepatuhan terhadap syariah pun perlu dilakukan oleh bank syariah. Kepatuhan terhadap syariah merupakan pilar penting dalam pengembangan bank syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan konvensional. Kepatuhan syariah mencerminkan bagaimana tanggung jawab dalam penerapan prinsip syariah pada aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah. Bank Indonesia menyatakan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi produk maupun dalam hal penyaluran dana (Astuti & Tarantang, 2020). Oleh karena itu pengungkapan terhadap kepatuhan syariah ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diungkapkan agar tidak terjadi adanya salah persepsi dari berbagai pihak terkait bank syariah (Mulazid, 2016).

Perbankan syariah di dunia pun mulai berkembang sejak tahun 1963 dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir. Kesuksesan *Mit Ghamr* ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia sehingga terbentuklah lembaga keuangan terbaik di beberapa negara. Berikut ini merupakan negara dengan keuangan syariah terbaik di dunia menurut *Islamic Development Bank* (IDB).



**Gambar 1.2 10 Negara dengan Keuangan Syariah Terbaik di Dunia**

*Sumber :* (Dinar Standard, 2020)

Berdasarkan gambar 1.2 Indonesia berada pada urutan ke 6 dari 10 negara berdasarkan *Top 10 Islamic Finance Indicator Score* dengan skor sebesar 111,6 pada tahun 2020. Posisi tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Indonesia masih menempati posisi ke 10 negara dengan keuangan syariah terbaik di dunia. Namun peringkat ini masih tertinggal jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia, negara Malaysia selama delapan tahun berturut-turut berhasil menempati posisi peringkat pertama negara dengan keuangan syariah terbaik dengan skor sebesar 389.

Meskipun pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sudah mulai menggeliat, pertumbuhan ini masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Saat ini nilai *market share* perbankan syariah Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan negara Malaysia. Tercatat nilai *market share* Indonesia yaitu sebesar 6,65% per february 2022 (OJK, 2022), Negara Malaysia sudah mencapai 29%. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian bagi perbankan syariah untuk terus mengembangkan perusahaannya.

Salah satu upaya perbankan syariah di Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya dari negara-negara tetangga, bank syariah kini bersinergi dengan melakukan penggabungan tiga bank BUMN syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Nasional Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi

Indah Nur Chazanah, 2023

**ANALISIS INDEX PENGUNGKAPAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DAN KEPATUHAN SYARIAH: STUDI KOMPARASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) TAHUN 2019-2021**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank hasil penggabungan tiga bank BUMN syariah kini berhasil menjadi bank dengan total aset terbesar ke-7 di Indonesia yaitu sebesar 265,289 triliun rupiah (BSI, 2021), Sedangkan di negara tetangga yaitu Malaysia, salah satu bank syariah yang setara dengan BSI adalah Bank Islam Malaysia Berhad yang memiliki total aset sebesar 80,2 Miliar Ringgit Malaysia atau setara dengan 267,84 Triliun Rupiah (bankislam.com, 2022). Jika dilihat dari segi total aset keduanya memiliki selisih yang sedikit yakni sebesar 2,56 Triliun Rupiah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk saat ini termasuk ke dalam jajaran 10 emiten dengan nilai kapitalisasi pasar atau *market capitalization* terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data dari *Equity Daily Trading Publication BEI* saat ini nilai kapitalisasi pasar BSI mencapai nilai 115 triliun rupiah (BSI, 2021). Tentunya nilai kapitalisasi yang tinggi ini menarik minat para investor untuk melakukan investasi. Namun saat ini minat para investor dalam berinvestasi tidak hanya sekedar melihat perkembangan dari segi komersialnya, terdapat beberapa pertimbangan lainnya baik dari segi sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan (Qoyum dkk., 2022). Sebagai perbandingan, di Malaysia salah satu bank terbaiknya yaitu BIMB dalam beberapa tahun terakhir berhasil memperoleh beberapa penghargaan seperti *best sustainability at islamic business and finance Southeast Asia*, *best CSR initiative*, *best ESG green financing in Malaysia* (bankislam.com, 2022).

Dalam pendekatan klasik konsep kinerja yang digagas oleh Milton Friedman (1970), tanggung jawab tertinggi dari sebuah perusahaan kepada pemegang saham adalah memaksimalkan keuntungan (Achim & Borlea, 2015). Namun pendapat ini dibantah oleh *stakeholder Theory*, menurut teori ini seluruh *stakeholder* memiliki hak dalam mengakses informasi terkait aktivitas organisasi yang berhubungan dengan mereka, walaupun ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer perusahaan mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan mengelola perusahaan dengan lebih efektif (Puspitosari, 2016).

Hingga saat ini penelitian terkait pengungkapan ESG pada bank syariah masih terbilang sangat sedikit. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait pengungkapan ESG (*Environmental, Social and Governance*) pada perusahaan

diantaranya adalah Yusof dkk. (2013) yang meneliti terkait pelaporan lingkungan dari enam bank syariah yang ada di Malaysia dan Indonesia menyebutkan bahwa pelaporan lingkungan bank syariah di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan Negara Malaysia. Namun dari kedua negara tersebut tingkat pelaporan kinerja lingkungannya masih terbilang rendah. Selanjutnya menurut penelitian Ramadhani, (2019) menyatakan bahwa Negara Malaysia memiliki kemajuan pengungkapan ESG yang kuat. Malaysia menjadi pasar terbesar yaitu 30% untuk investasi berkelanjutan antar negara anggota ASEAN. Begitupun dengan Negara Indonesia yang secara keseluruhan memiliki pengungkapan ESG yang baik dibandingkan negara lainnya. Penelitian Qoyum dkk. (2022) mengungkapkan bahwa pengungkapan kinerja ESG perusahaan berbasis Islam di Indonesia dan Malaysia lebih baik dibandingkan perusahaan konvensional.

Berdasarkan hasil paparan kinerja kedua bank syariah di Indonesia dan Malaysia peneliti memilih Bank BSI dan Bank Islam Malaysia Berhad sebagai subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu terdapat data perkembangan keuangan syariah Indonesia dan Malaysia yang masih terdapat ketimpangan, serta rendahnya transparansi pengungkapan dan tata kelola yang baik pada perbankan syariah dan penelitian terkait *Environmental, Social and Governance* (ESG) pada bank syariah yang masih sangat jarang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Index Pengungkapan *Environmental, Social Governance* (ESG) dan Kepatuhan Syariah: Studi Komparasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Tahun 2019-2021”** untuk melihat Bagaimana kondisi pengungkapan kinerja ESG (*Environmental, Social dan Governance*) dan kepatuhan syariah pada kedua bank tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bank syariah dituntut untuk berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan *sustainable financing* (OJK, 2021).
2. Pada tahun 2021 terdapat lima puluh lembaga keuangan dan bank terbesar di dunia tercatat meningkatkan investasi dalam praktik perusahaan yang menyebabkan defortasi dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Praktik ini tidak sejalan dengan tujuan lembaga keuangan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku (Earth.org, 2021).

3. Rendahnya tingkat pengungkapan dan transparansi terkait tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial dan tatakelola pada bank syariah (Syafrullah & Muharam, 2017).
4. Adanya tuntutan dari para investor dan pemerintah kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik (Qoyum dkk., 2022).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pengungkapan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pengungkapan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan kepatuhan syariah pada Bank Islam Malaysia Berhad tahun 2019-2021?
3. Bagaimana perbandingan kinerja pengungkapan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan kepatuhan syariah pada BSI dan BIMB?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait pengungkapan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Islam Malaysia Berhad tahun 2019-2021. Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui bank yang memiliki kinerja pengungkapan ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan kepatuhan syariah lebih baik.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca mengenai topik yang disajikan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait kinerja bank syariah ditinjau dari pengungkapan *Environmental, Social, Governance* dan *Sharia Compliance*
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait seberapa besar tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan,

Indah Nur Chazanah, 2023

**ANALISIS INDEX PENGUNGKAPAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DAN KEPATUHAN SYARIAH: STUDI KOMPARASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) TAHUN 2019-2021**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sosial dan tatakelola, yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menyimpan dana dalam ketiga bank tersebut.

- c. Bagi Institusi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan peningkatan kinerja bank syariah.
- d. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sumber informasi terkait pengungkapan ESG dan kepatuhan syariah untuk pengambilan keputusan dalam melakukan aktivitas investasi pada bank tersebut.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan tambahan literatur dalam penelitian selanjutnya.